



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU

Jalan Dr. Susilo No. 19, Bandar Lampung 35214 Telp. 0721- 261977 – 262743 Fax. 253004

Situs www.pajak.go.id, Email pengaduan@pajak.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). LAKIN KPP Pratama Bandar Lampung Satu Tahun 2024 memiliki tujuan utama sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Bandar Lampung Satu 2024. Perjanjian Kinerja tersebut memiliki 10 sasaran strategis yang kemudian dibagi atas 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective* yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut telah dilaksanakan dengan baik, penuh kerja keras, berfikir cerdas dan dilakukan dengan efektif dan efisien. Pada tahun 2024, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai 100% penerimaan pajak atau sebesar Rp1.148.567.871.683 dan indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,69.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu akan selalu berupaya dan bekerja keras agar pencapaian IKU di tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal dan lebih baik lagi. Penyusunan LAKIN ini diharapkan agar seluruh *stakeholders* dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan selama tahun 2024. Serta mendorong dan memotivasi seluruh jajaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu agar terus meningkatkan kinerjanya sehingga sasaran dan tujuan untuk mencapai visi dan misi dapat terealisasi.

Bandar Lampung, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Imam Nashirudin



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
C. Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	102
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	102
D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	102
BAB IV PENUTUP.....	104
Lampiran.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam APBN. Penyusunan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat pengukur kinerja secara kuantitatif serta sebagai terwujudnya *good governance*. Selain itu, LAKIN juga sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan salah satu alat pemacu untuk meningkatkan kinerja kantor dan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bandar Lampung Satu tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan negara dan sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN. Undang-Undang mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan mengadministrasikan penerimaan negara dari pajak. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak tersebut didelegasikan kepada unit vertikal dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu sebagai instansi vertikal di bawah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memperoleh mandat untuk melaksanakan tugas penghimpunan pajak di wilayah kerjanya yang meliputi kota Bandar Lampung dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1.147.058.858.000 di tahun 2024. Dalam mencapai target penerimaan tersebut tentu terdapat tantangan seperti pengawasan kepatuhan dan penggalan potensi pajak, pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Wajib Pajak yang tidak kooperatif saat dilakukan pemeriksaan & penagihan pajak, dan Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bandar Lampung Satu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. KPP Pratama Bandar Lampung Satu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPP Pratama Bandar Lampung Satu menyelenggarakan fungsi:

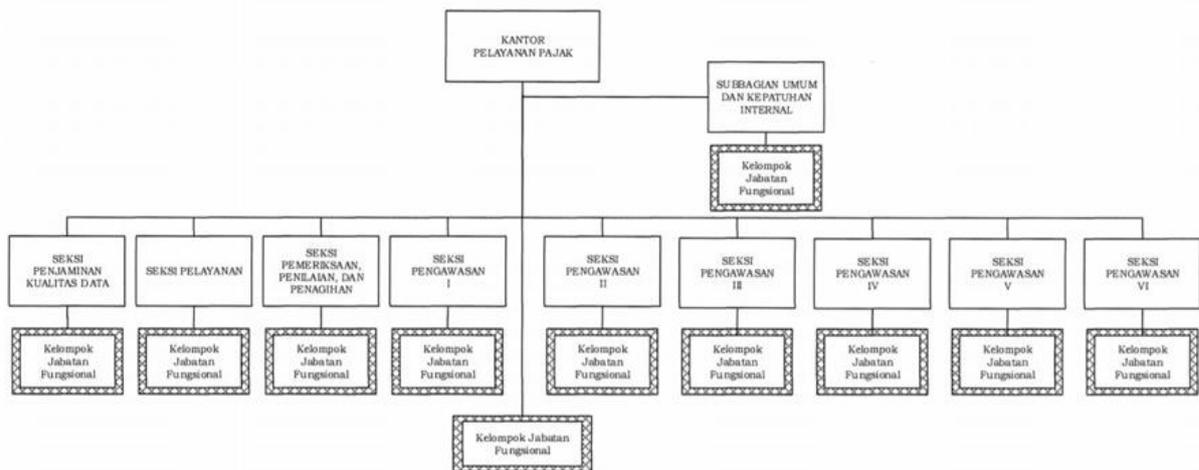
- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

t. pelaksanaan administrasi kantor.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu tersebut diatas, maka disusun pula Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu sesuai dengan Pasal 60 PMK Nomor 184/PMK.01/2020. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

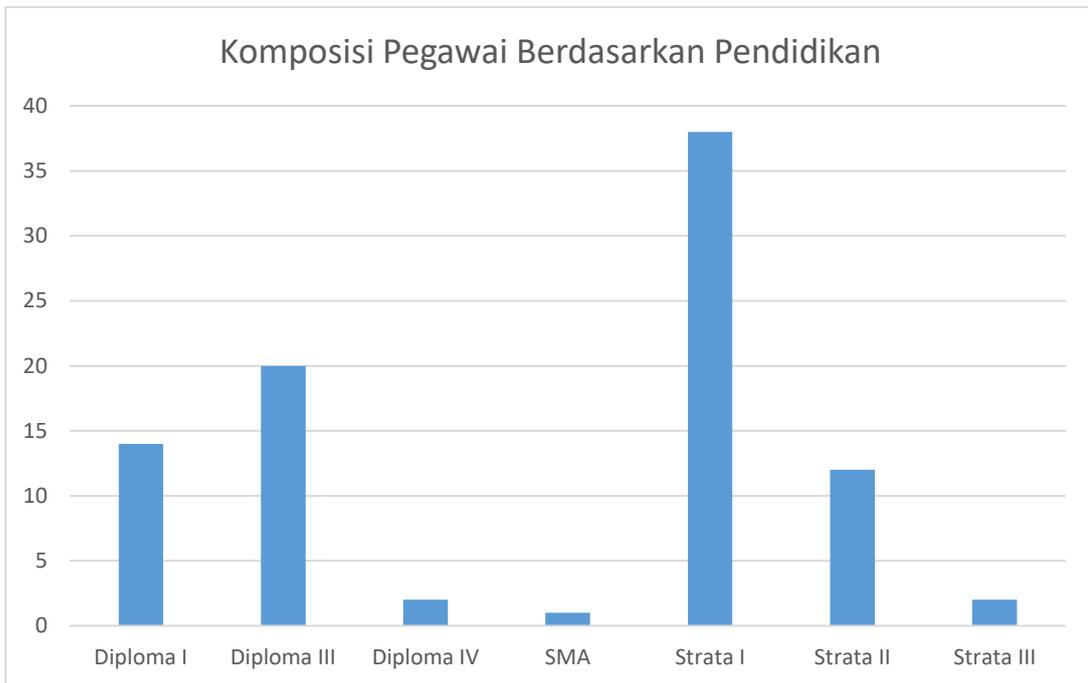
Struktur Organisasi KPP Pratama Bandar Lampung Satu



Sumber: Lampiran IV PMK Nomor 184/PMK.01/2020

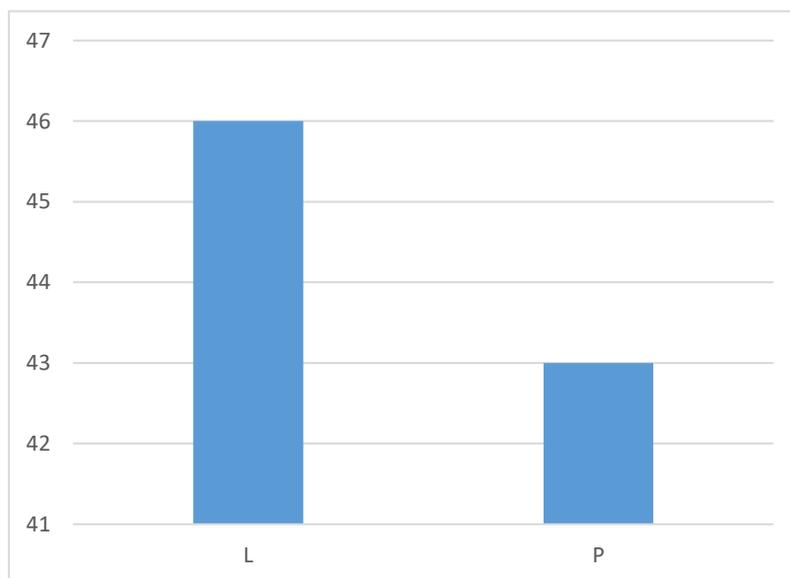
KPP Pratama Bandar Lampung Satu per tanggal 31 Desember 2024 memiliki 89 orang pegawai. Para pegawai memiliki latar belakang pendidikan bidang keahlian, yaitu perpajakan, akuntansi, manajemen, dan hukum. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang sedang menempuh pendidikan di luar kedinasan pada perguruan tinggi yang

terdapat di Bandar Lampung dan 4 pegawai yang sedang melanjutkan Tugas Belajar. Berikut disampaikan komposisi pegawai berdasarkan Pendidikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Data Kepegawaian KPP Pratama Bandar Lampung Satu

Berikut pula disampaikan komposisi pegawai berdasarkan Gender.

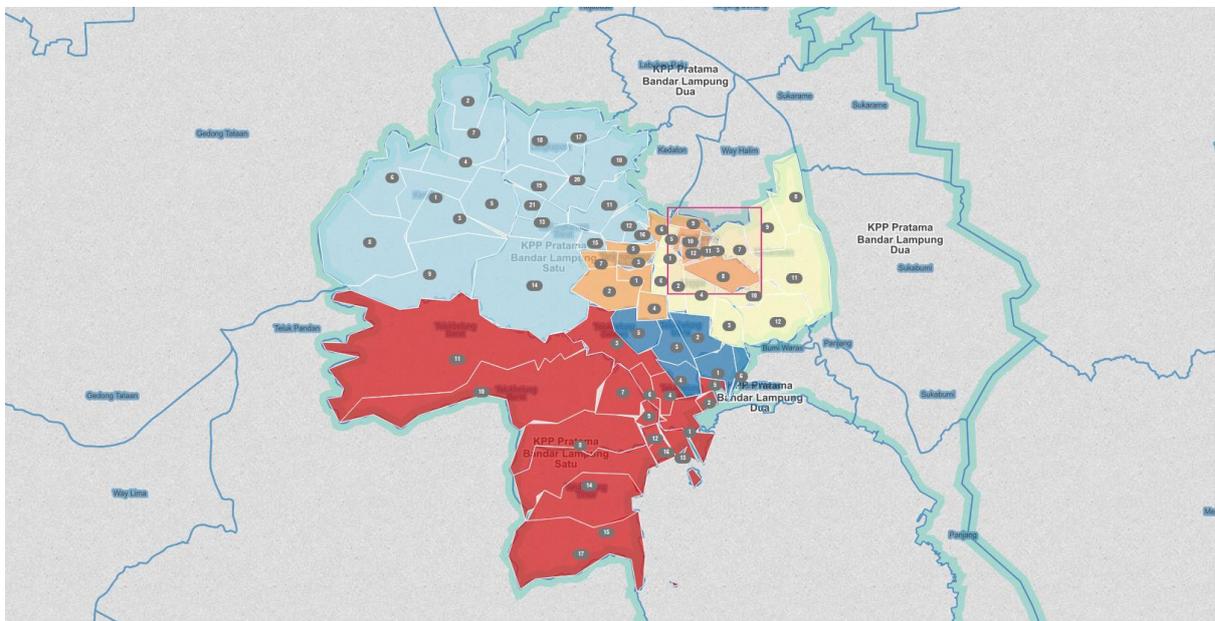


Wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Satu mencakup 11 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung dengan luas 97,1 km² dan jumlah penduduk sebanyak 539.432 jiwa. 11 kecamatan tersebut yaitu:

- a. Kecamatan Enggal
- b. Kecamatan Kedamaian

- c. Kecamatan Kemiling
- d. Kecamatan Langkapura
- e. Kecamatan Tanjung Karang Barat
- f. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
- g. Kecamatan Tanjung Karang Timur
- h. Kecamatan Teluk Betung Barat
- i. Kecamatan Teluk Betung Selatan
- j. Kecamatan Teluk Betung Timur
- k. Kecamatan Teluk Betung Utara

Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Bandar Lampung Satu



Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Bandar Lampung Satu

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini diuraikan menjadi subbab Latar Belakang, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, dan Sistematika Laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini diuraikan menjadi 2 subbab yaitu Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dibagi menjadi 5 subbab antara lain:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi yang telah dilakukan oleh organisasi yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Dapat berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Dokumentasi yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi *Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"* serta misi 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, DJP memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan, yaitu 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 2) Penerimaan negara yang optimal; dan 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dan dalam rangka mencapai tujuannya, DJP memiliki sasaran strategis, yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang merupakan penerjemahan atas informasi tema APBN 2024 yaitu Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema ini digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Sasaran strategis DJP tersebut diturunkan ke Kepala KPP Pratama Bandar Lampung Satu dalam Perjanjian Kinerja yang tertuang ke dalam 10 sasaran strategis. Pelaksanaan sasaran strategis ini diuraikan dengan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. PK tahun 2024 tersusun atas 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). 20 IKU ini memiliki target masing-masing yang harus dicapai selama 1 tahun. Pada tahun 2024, terdapat addendum Perjanjian Kinerja yang berisi penambahan target pada 1 IKU di Triwulan III. Penyusunan PK ini telah mengakomodir amanat dalam dokumen Renstra DJP, seperti sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, edukasi dan pelayanan yang efektif, pengawasan pembayaran masa yang efektif, pengujian kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif, data dan informasi yang berkualitas, pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya dengan mengirimkan Nota Dinas ND-1152/KPP.2803/2023 tentang Penyampaian Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandar Lampung Satu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kode IKU/Sub IKU	Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
<i>Customer Perspective</i>				

No	Sasaran Strategis	Kode IKU/Sub IKU	Indikator Kinerja Utama	Target
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
<i>Internal Process Perspective</i>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%

No	Sasaran Strategis	Kode IKU/Sub IKU	Indikator Kinerja Utama	Target
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
<i>Learning & Growth Perspective</i>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Bandar Lampung Satu

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target pada tiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Perjanjian Kerja. Secara umum indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Bandar Lampung Satu tahun 2024 dapat tercapai sebesar 109,69 dengan predikat Istimewa. Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 19 capaian IKU yang berstatus hijau (capaian di atas 100 dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU yang berstatus kuning (capaian di antara 80 s.d. 100 dari target yang ditetapkan). Rincian IKU dan capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,75
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,75
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,58	Max	P/L	19,00%	42,22%	101,58
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,72
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,05
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,91%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,91
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,34%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,34
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,39
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,39%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,39
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,37
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,74%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,74
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,97%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,32
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,98%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,98
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,60%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00

8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	92,33%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>								25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,94
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,27	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,26
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,69

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bandar Lampung Satu Tahun 2024

Berikut ini adalah evaluasi capaian dan analisis kinerja di KPP Pratama Bandar Lampung Satu yang dijabarkan menurut sasaran strategis masing-masing:

a. Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal

• Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,82%	48,25%	48,25%	69,81%	69,81%	100,13%	100,13%
Capaian	119,10%	100,52%	100,52%	93,08%	93,08%	100,13%	100,13%

Sumber: Apportal

• Deskripsi Sasaran Strategis

IKU ini memiliki SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal, yaitu optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak memiliki definisi, yaitu realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan

pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dibagi target penerimaan pajak dikali 100%.

Pada tahun 2024, target penerimaan pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar Rp1.147 miliar. Realisasi penerimaan neto KPP periode s.d 31 Desember 2024 mencapai Rp1.148 milyar (100,13% dari target APBN 2024) dengan pertumbuhan +16,63% yoy. Adapun realisasi restitusi sebesar Rp 15 milyar (tumbuh +339,15% yoy). Kinerja penerimaan neto ditopang oleh penerimaan PPM sebesar Rp1.042 milyar yang berkontribusi 90,75% dari total penerimaan dan penerimaan PKM sebesar Rp106 milyar yang berkontribusi 9,25% dari total penerimaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	94,49%	112,77%	125,29%	106,75%	100,13%

Sumber: Appportal

IKU realisasi penerimaan pajak selalu mencapai target pada 4 tahun terakhir, tetapi pada tahun 2020 tidak mencapai target dikarenakan perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Lalu capaian penerimaan pajak di tahun 2024 didorong oleh pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari

pengawasan kepada Wajib Pajak di berbagai sektor serta pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,13%

Sumber : Apportal

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagaimana berikut:

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,13%	100,46%

Penerimaan pajak KPP Pratama Bandar Lampung Satu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Mayoritas jenis pajak utama tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sejumlah jenis pajak terbesar menunjukkan pertumbuhan positif, di antaranya: PPN

Dalam Negeri (+10,55%yoy), PPh Pasal 21 (+32,57% yoy), dan PPh Final (-1,62% yoy).

5. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	100,13%	100,06%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai realisasi sebesar 100,13% melampaui target dengan surplus sebesar 0,13%. Sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai realisasi sebesar 100,06% melampaui target dengan surplus sebesar 0,06%. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Bandar Lampung Satu memperoleh kinerja yang lebih tinggi dibandingkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, dengan selisih surplus sebesar 0,07%.

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Pengawasan pembayaran masa dengan mengawasi Wajib Pajak yang tidak/kurang setor Pajak Rutin dan menerbitkan surat imbauan
- b. Bedah Profil WP untuk penggalian potensi pajak
- c. Pelaksanaan Pengamatan dan KPDL
- d. Visit dan konseling dan edukasi terhadap Wajib Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan kinerja realisasi penerimaan pajak, yaitu dengan melakukan pengawasan Wajib Pajak oleh segenap aktor DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor serta pengelolaan

aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yang efektif.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak, yaitu Wajib Pajak memiliki kegiatan tetapi tidak setor PPh, aturan baru yang menyebabkan Wajib Pajak tidak update terhadap aturan perpajakan, serta cakupan kewilayahan yang luas menyulitkan AR untuk pemantauan Wajib Pajak yang diampu.
- c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor pendorong penurunan realisasi IKU adalah dengan menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai, lalu dengan melakukan rapat monitoring capaian tiap minggu, serta mengimbuau Wajib Pajak secara persuasif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU persentase realisasi penerimaan pajak tidak luput dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu, di antaranya :

1. Meningkatnya pembayaran pajak dari sektor pemerintah yang merupakan sektor dominan KPP.
2. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja penerimaan.
3. Pelaksanaan program edukasi yang intensif kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.
4. Peningkatan komunikasi dengan Wajib Pajak melalui pendekatan yang persuasif untuk mendorong pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar.
5. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi, seperti pemeriksaan pajak serta kunjungan lapangan, untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.
6. Melakukan pengawasan secara optimal kepada Wajib Pajak yang tidak/kurang setor dengan menerbitkan imbauan atau SP2DK

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan guna pencapaian realisasi penerimaan pajak sejalan dengan rencana aksi atau mitigasi risiko tahun 2024, yaitu dengan melakukan :

- a. Pengelompokan WP per sub sektor untuk mencari potensi dan dilakukan Tax Conseling
- b. Sosialisasi kepada WP yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak

- c. Mengadakan bimbingan kepada WP yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak
- d. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan peningkatan kompetensi pegawai
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Atas penerimaan pajak yang telah dicapai, pajak sebagaimana sumber penerimaan terbesar dalam APBN memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi ini berupa pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas pada fasilitas umum, pemberian insentif bagi sektor yang memperkerjakan penyandang disabilitas, pendistribusian melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial, serta digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Selain itu, atas pajak yang telah berhasil dikumpulkan DJP digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. Untuk sektor kesehatan, pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Untuk sektor infrastruktur, pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja penerimaan pajak tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penggalian potensi, dan pemanfaatan data yang belum optimal. Namun, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah berupaya melakukan yang terbaik dalam mengawasi Wajib Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu bertekad untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Pengawasan pembayaran masa khususnya WP penentu penerimaan
- b. Meningkatkan pengawasan WP dan potensi pajak dengan kegiatan pengamatan dan KPDL
- c. Melakukan *update* dan bedah profil wajib pajak terkait proses bisnis
- d. Mengusulkan DPP yang berpotensi pembayaran
- e. Menindaklanjuti dan melakukan adjustment DPP Mandatory
- f. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

Target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 adalah 100. Adapun capaian target dan realisasi sebagaimana di tabel :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	110	110	105	105	101,58	101,58
Capaian	110,00%	110,00%	110,00%	105,00%	105,00%	101,58%	101,58%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini memiliki SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal, yaitu optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

IKU ini memiliki definisi Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Komponen-komponen IKU tersebut adalah :

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
 - b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
3. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.
4. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Formula IKU ini adalah

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Realisasi pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 116,5% dan pertumbuhan nasional sebesar 110,93% sehingga besaran realisasi komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 113,16%. Lalu komponen deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 90% dengan deviasi sampai dengan triwulan IV 8,52%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	75,2%	110,48%	106,77%	118,53	101,58

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas selalu mencapai target pada 4 tahun terakhir, tetapi pada tahun 2020 tidak mencapai target dikarenakan perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Capaian kinerja tahun 2024 ini didukung dengan pengawasan kepada Wajib Pajak di berbagai sektor serta pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	101,58	106,41

KPP Pratama Bandar Lampung Satu mencapai realisasi sebesar 101.58, melampaui target dengan surplus sebesar 1.58 sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua menunjukkan kinerja yang lebih tinggi, dengan realisasi sebesar 106.41, melampaui target dengan surplus sebesar 6.41.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Pengawasan pembayaran masa dengan mengawasi Wajib Pajak yang tidak/kurang setor Pajak Rutin dan menerbitkan surat imbauan
 - b. Bedah Profil WP untuk penggalan potensi pajak
 - c. Pelaksanaan Pengamatan dan KPDL
 - d. Visit dan konseling dan edukasi terhadap Wajib Pajak
 - e. Berkoordinasi dengan kepala seksi pengawasan yang mengawasi wajib pajak dengan pembayaran relatif besar
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan kinerja, yaitu dengan melakukan pengawasan Wajib Pajak oleh AR serta melakukan pendekatan yang persuasif.
 - b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak, yaitu terjadi pelambatan pada belanja pemerintah yang mengakibatkan setoran pajak menurun dan terdapat setoran yang sifatnya tidak rutin dengan nominal relatif besar yang mengakibatkan deviasi tidak menentu.
 - c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor pendorong penurunan realisasi IKU adalah dengan mengirimkan daftar nominatif sesuai dengan matriks masukan DRM untuk penghitungan prognosa bulanan serta melakukan perubahan pada rumus penghitungan prognosa.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU tidak luput dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu, seperti :

- a. Berkoordinasi dengan seksi pengawasan untuk mengawasi Wajib Pajak dengan pembayaran relatif besar atau signifikan yang dapat mempengaruhi besaran deviasi.
- b. Berkoordinasi dengan seksi pelayanan dan seksi P3 untuk mengetahui nilai SPMKP.
- c. Berkoordinasi dengan seksi pengawasan untuk mengawasi dan melakukan penjagaan setoran pajak dari instansi pemerintah yang merupakan sektor dominan penerimaan KPP.

- d. Memperhitungkan daftar nominatif sesuai dengan matriks masukan DRM untuk penghitungan prognosa bulanan disetiap awal bulan secara lebih akurat dan realistis.
 - e. Menyusun proyeksi penerimaan pajak yang realistis sehingga KPP dapat membuat prognosa penerimaan pajak yang lebih akurat untuk mendukung penerimaan pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan.
 - b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai
 - c. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penghimpunan penerimaan pajak
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu saja memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah pertumbuhan pada Triwulan I cukup tinggi tetapi saat Triwulan II mulai menurun dan terjadinya pelambatan pada belanja pemerintah yang mengakibatkan setoran pajak menurun.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu bertekad untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Pengawasan pembayaran masa khususnya WP strategis dan penentu penerimaan per Seksi
- b. Mengusulkan DPP yang berpotensi pembayaran
- c. Menindaklanjuti dan melakukan adjustment DPP Mandatory
- d. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding
- e. Asistensi bendahara pemerintah
- f. Memperhitungkan daftar nominatif matriks masukan DRM untuk perhitungan prognosa bulanan secara lebih akurat
- g. Update dan bedah profil wajib pajak terkait proses bisnis
- h. Membuat penghitungan prognosa secara rutin untuk proyeksi perencanaan kas

b. **Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,32%	49,75%	49,75%	71,68%	71,68%	99,91%	99,91%
Capaian	121,60%	103,65%	103,65%	95,57%	95,57%	99,91%	99,91%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini memiliki SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, yaitu peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki definisi, penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Pada tahun 2024, target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar Rp1.043 miliar. Realisasi penerimaan KPP periode s.d 31 Desember 2024 mencapai Rp1.042 milyar (99,91% dari target). Kinerja penerimaan ini berkontribusi 90,75% dari total penerimaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	111,93%	130,3%	109,18%	99,91%

Sumber: Mandor

IKU ini mulai dilaksanakan pada 4 tahun terakhir dan untuk 3 tahun pertama selalu mencapai target. Capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM di tahun 2024 didorong oleh pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PPM didukung oleh pengawasan pembayaran masa khususnya WP Penentu penerimaan/Strategis yang dilakukan oleh *Account Representative*.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU penerimaan pajak dari kegiatan PPM ini merupakan komponen IKU dari Renstra DJP, yaitu persentase realisasi penerimaan negara. Target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	99,91%

Sumber : Mandor

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagaimana berikut:

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	99,91%	100,42%

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Bandar Lampung Satu sampai dengan akhir Desember 2024 dapat mencapai 99,91% dari target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, realisasi IKU tersebut mengalami pertumbuhan 13,3% dari tahun 2023 dimana tahun 2023 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM berhasil terkumpul sebesar Rp919 miliar.

5. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	99,91%	99,95%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu mencapai realisasi sebesar 99,91%, sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai realisasi sebesar 99,95%, adapun target yang ditetapkan adalah 100%, hal ini menandakan bahwa kedua KPP tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan karena adanya *smoothing* target penerimaan pajak yang ditetapkan pada KEP-264/WPJ.28/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Nomor KEP-67/WPJ.28/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Tahun Anggaran 2024 dan perubahan keempat target angka mutlak IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan kegiatan PKM sebagaimana ditetapkan dalam ND-3491/WPJ.28/2024.

Sebelum adanya *smoothing*, capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah 100,47%

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Pengawasan pembayaran masa dengan mengawasi Wajib Pajak yang tidak/kurang setor Pajak Rutin dan menerbitkan surat imbauan
- b. Penerbitan STP dan Dinamisasi PPh Pasal 25 Pelaksanaan
- c. Pengamatan dan KPDL
- d. Pemanfaatan data perpajakan yang tersedia untuk penerbitan SP2DK dan Surat Imbauan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Hal ini disebabkan karena adanya *smoothing* yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya factor pendorong penurunan realisasi IKU adalah mengusulkan pertimbangan pelaksanaan *smoothing* di akhir masa penerimaan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu, seperti pengiriman surat imbauan ke WP yang tidak/kurang setor rutin, dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, dan pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan guna pencapaian realisasi penerimaan pajak sejalan dengan rencana aksi atau mitigasi risiko tahun 2024, yaitu dengan melakukan :

- a. Pengelompokan WP per sub sektor untuk mencari potensi dan dilakukan *Tax Conseling*
- b. Sosialisasi kepada WP yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak
- c. Mengadakan bimbingan kepada WP yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak
- d. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan
- e. Pemanfaatan data internal (approweb, appportal, mpn-info, dms) dan data eksternal (Bea Cukai) secara menyeluruh

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Atas penerimaan pajak yang telah dicapai, pajak sebagai kontributor terbesar dalam APBN, berkontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas pada fasilitas umum, pemberian insentif bagi sektor yang memperkerjakan penyandang disabilitas, pendistribusian melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial, serta pajak digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Selain itu, pajak juga digunakan sebagai sumber dana untuk mendukung program pemerintah terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu dengan membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. Untuk sektor kesehatan, pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Untuk sektor infrastruktur, pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan Masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya selama setahun. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penggalan potensi, dan pemanfaatan data yang belum optimal. Namun, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah berupaya melakukan yang terbaik dalam mengawasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu bertekad untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Pengawasan pembayaran masa khususnya WP penentu penerimaan
- b. Meningkatkan pengawasan WP dan potensi pajak dengan kegiatan pengamatan dan KPDL
- c. Melakukan *update* dan bedah profil wajib pajak terkait proses bisnis
- d. Mengusulkan DPP yang berpotensi pembayaran
- e. Menindaklanjuti dan melakukan adjustment DPP Mandatory
- f. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

- 1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	97,77%	107,56%	107,56%	106,54%	106,54%	107,34%	107,34%
Capaian	162,95%	134,45%	134,45%	118,38%	118,38%	107,34%	107,34%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini memiliki SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, yaitu peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2024, target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebanyak 48.410. Realisasi IKU kepatuhan periode s.d 31 Desember 2024 mencapai 51.962 (107,34% dari target). Realisasi ini terdiri dari kriteria WP Strategis sebanyak 628,2 dan kriteria WP Kewilayahan sebanyak 51.333,8.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,38%	104,48%	107,46%	104,19%	107,34%%

Sumber: Mandor

Jika dilihat pada tabel di atas, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai target selama lima tahun berturut-turut untuk IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Capaian IKU ini didukung oleh kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh AR dan Fungsional Penyuluh.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	107,34%	104,63%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu mencapai 107,34%, melampaui target dengan surplus sebesar 7,34%, sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai 104,63%, melampaui target dengan surplus sebesar 4,63%. KPP Pratama Bandar Lampung Satu memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan KPP Bandar Lampung Dua dengan selisih surplus sebesar 2,71% lebih tinggi.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Pengiriman surat ke Kepala Satuan Kerja terkait pemenuhan kewajiban perpajakan pegawai/ASN
- b. Pengiriman surat imbauan penyampaian “SPT Tahunan Lebih Awal, Lebih baik”
- c. Pelaksanaan program edukasi perpajakan seperti kelas pajak, pojok pajak, kampanye simpatik untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya penyampaian SPT Tahunan.
- d. Upaya proaktif dalam memonitoring Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT dengan melakukan imbauan secara berkala melalui WA Blast, Sosial Media dan Surat
- e. Kolaborasi *Account Representative* dan Asisten Penyuluh dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta melakukan layanan di luar kantor dalam rangka peningkatan kepatuhan.
- f. Mengedukasi Wajib Pajak yang merespon surat teguran

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja kinerja realisasi IKU ini, yaitu dengan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak, membuka Pojok Pajak, dan pengiriman Whatsapp Blast.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu, seperti koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan pemberi kerja untuk penerbitan bukti potong, kegiatan penyuluhan, sosialisasi melalui kelas pajak tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan, Publikasi Informasi terkait pelaporan SPT Tahunan, serta Dukungan dari Pemerintah Kota (Walikota/Kepala Dinas/Instansi Vertikal).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan guna pencapaian realisasi penerimaan pajak sejalan dengan rencana aksi atau mitigasi risiko tahun 2024, yaitu dengan melakukan :

- a. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- b. Menerbitkan imbauan SPT Tahunan
- c. Menyelenggarakan kelas pajak khusus bagi Wajib Pajak baru untuk dilakukan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakannya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi yaitu dengan melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan untuk kegiatan edukasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya selama setahun. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah kesadaran melaporkan kewajiban perpajakan pada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang masih rendah. Hal ini diatasi dengan penyampaian imbauan, pemberitahuan informasi kelas pajak, dan kegiatan edukasi lainnya oleh penyuluh maupun AR.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu bertekad untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Edukasi kelas Pajak dan Pojok Pajak
- b. Memberikan pelayanan prima, responsif, dan citra positif saat WP datang ke kantor
- c. Pengiriman Surat Teguran WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan
- d. Imbauan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan melalui surat elektronik, WhatsApp blast, telepon, atau e-mail blast
- e. Sosialisasi *door to door* penyampaian SPT sebagai bagian dari kegiatan KPDL
- f. Melakukan komunikasi secara persuasif untuk WP yang dipandang perlu dilakukan konsultasi secara intensif
- g. Imbauan kepada instansi Pemerintah untuk menyelesaikan pembuatan Bukti Potong 1721 A2 untuk ASN/Pegawai

c. **Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,13%	28,23%	28,23%	48,63%	48,63%	102,39%	102,39%
Capaian	68,52%	56,46%	56,46%	64,84%	64,84%	102,39%	102,39%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini memiliki SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, yaitu Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) memiliki definisi, penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak..

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Pada tahun 2024, target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar Rp103 miliar. Realisasi penerimaan KPP periode s.d 31 Desember 2024 mencapai Rp106 milyar (102,4% dari target). Kinerja

penerimaan ini berkontribusi 9,25% dari total penerimaan. Pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan PKM cukup baik, yaitu sekitar 60%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	-	123,95%	105,34%	75,2%	102,4%

Sumber: Mandor

Diliat dari historis 4 tahun terakhir, realisasi IKU pada tahun 2023 tidak tercapai. Namun, pada tahun 2024 kembali tercapai dengan didorong oleh optimalisasi pemanfaatan data, baik data approweb, apportal, maupun data dari Kanwil dan melakukan Visit Wajib pajak yang mempunyai potensi pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU penerimaan pajak dari kegiatan PKM ini merupakan komponen IKU dari Renstra DJP, yaitu persentase realisasi penerimaan negara. Target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	102,4%

Sumber : Mandor

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagaimana berikut:

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	102,4%	100,98%

5. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	102,39%	101,12%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai 102,39%, melampaui target dengan surplus sebesar 2,39%, sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai 101,12%, melampaui target dengan surplus sebesar 1,12%. KPP Pratama Bandar Lampung Satu memperoleh capaian yang lebih tinggi dibandingkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, dengan selisih surplus realisasi sebesar 1,27%.

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Profiling WP, penerbitan SP2DK dan himbauan untuk menyeter pajak yang kurang bayar
- b. Optimalisasi Pemanfaatan data, baik data approweb, apportal, maupun data dari Kanwil
- c. Pembuatan SP2DK sesuai Dafnom WP DPP yang telah dibuat dengan memprioritaskan Wajib Pajak yang memiliki *success rate* tinggi
- d. Membuat LHP2DK atas respon SP2DK oleh WP
- e. Melakukan tindakan penagihan aktif dan persuasif kepada penanggung pajak
- f. Menyampaikan himbauan kepada wajib pajak untuk dapat segera melakukan pembayaran setelah SKP terbit
- g. Melaksanakan edukasi dan konseling untuk meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak
- h. Melakukan penelitian material atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM, yaitu dengan pengawasan yang optimal kepada Wajib Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu, seperti pengawasan Wajib Pajak yang efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu, monitoring atas SKP yang terbit untuk segera dibayar, dan tindakan penagihan aktif yang optimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan guna pencapaian realisasi penerimaan pajak sejalan dengan rencana aksi atau mitigasi risiko tahun 2024, yaitu dengan melakukan :

- a. Meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan
- b. Menyelenggarakan *In House Training* bagi AR mengenai pemanfaatan data approweb
- c. Melakukan rapat/pertemuan yang dapat dikemas dalam kegiatan coffee morning untuk melakukan pemantauan kinerja *Account Representative*

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggalian potensi perpajakan
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Atas penerimaan pajak PKM yang telah dicapai, pajak berkontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Contoh nyata kontribusinya yaitu dengan melakukan pembangunan fasilitas yang ramah

disabilitas pada fasilitas umum, pemberian insentif bagi sektor yang memperkerjakan penyandang disabilitas, pendistribusian melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial, serta pajak digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Selain itu, pajak juga digunakan sebagai sumber dana untuk mendukung program pemerintah terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu dengan membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. Untuk sektor kesehatan, pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Untuk sektor infrastruktur, pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan Masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya selama setahun. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penggalian potensi, dan pemanfaatan data yang belum optimal, *ability to pay* Wajib pajak/penanggung pajak yang rendah, tunggakan atas wajib pajak DSPC sebagian besar sudah daluwarsa/ berkategori macet, Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pembayaran SKP dan STP pemeriksaan yang telah diterbitkan, Wajib Pajak tidak ditemukan sehingga proses pemeriksaan tidak berjalan lancar, dan potensi dari bahan baku pemeriksaan yang ada masih belum mencukupi untuk target PKM pemeriksaan. Namun, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah berupaya melakukan yang terbaik dalam mengawasi dan mengimbau Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu bertekad untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Optimalisasi pemanfaatan data approweb dan apportal

- b. Melakukan himbauan dan klarifikasi atas Wajib Pajak yang setorannya turun
- c. Pembuatan dan *update* profil wajib pajak terkait proses bisnis
- d. Melakukan pemindahbukuan atas rekening yang telah diblokir dan sita
- e. Mengupayakan pencairan atas WP DSPC dan non DSPC baik dengan pembayaran langsung ataupun lewat angsuran
- f. Mengajukan usul hapus atas tunggakan yang telah daluwarsa
- g. Melakukan pemantauan dan himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran segera setelah SKP dan STP diterbitkan
- h. Menambah bahan baku pemeriksaan melalui pengusulan DSPP Kolaboratif tahun 2025
- i. Menginstruksikan pegawai yang tercantum dalam Tim Penyusunan KKA untuk melakukan pengusulan pemeriksaan melalui DSPP kolaboratif tahun 2025

d. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	80,39%	87,59%	87,59%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%						

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini memiliki SS Edukasi dan pelayanan yang efektif, yaitu Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki definisi, yaitu Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta

peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
 2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
 3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	80,4%	80,4%	84%	88,8%

Sumber: Mandor

Diliat dari historis 5 tahun terakhir, realisasi IKU selalu tercapai. Capaian ini didukung oleh kegiatan edukasi dan penyuluhan yang baik yang dilakukan Penyuluh Pajak.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	74%	74%
2	Realisasi	88,80%	88,80%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Edukasi dan penyuluhan baik daring maupun luring
- b. Pemasangan media informasi edukasi dan penyuluhan luar ruang
- c. Pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan edukasi dan penyuluhan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu dengan edukasi perpajakan secara berkala dan terencana.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu, seperti identifikasi kelompok wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, menyelenggarakan Kegiatan Pajak Bertutur/Tax Goes to School, kegiatan edukasi ke Bendaharawan, Kelas Pajak, dan kegiatan edukasi *one on one* serta *one to many* kepada Wajib Pajak, dan memanfaatkan *platform digital*, seperti media sosial untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan guna pencapaian realisasi penerimaan pajak sejalan dengan rencana aksi atau mitigasi risiko tahun 2024, yaitu dengan melakukan :

- a. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru, yaitu talkshow, siaran radio, live instagram, podcast dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten
- b. Edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik (pelajar dan mahasiswa) dari jenjang dasar, menengah dan tinggi maupun bagi calon Wajib Pajak Potensial

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengedukasi Wajib Pajak
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya selama setahun. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya, maka KPP Pratama Bandar Lampung Satu melakukan edukasi dan penyuluhan yang efektif baik dalam kuantitas maupun kualitasnya yang mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu bertekad untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Peningkatan edukasi dan penyuluhan yang terarah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
- b. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan media untuk menyampaikan edukasi dan penyuluhan
- c. Edukasi perpajakan secara berkala dan terencana

• **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,36%	6,40%	12,76%	6,00%	18,00%	94,74%	94,74%
Capaian	127,20%	128,00%	127,60%	120,00%	120,00%	112,74%	112,74%

Sumber: KPDJP

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini memiliki SS Edukasi dan pelayanan yang efektif, yaitu Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

Pada tahun 2024, target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah 100%. Realisasi IKU sebesar 94,74% dengan capaian 112,74%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	113,5%	87,38	91,23	81,69	112,74%

Sumber: KP DJP

Diliat dari historis 5 tahun terakhir, realisasi IKU selalu tercapai. Hal ini didorong oleh edukasi dan penyuluhan yang baik melalui daring maupun luring kepada Wajib Pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan ini merupakan komponen IKU dari Renstra DJP, yaitu Indeks kepuasan publik atas layanan DJP. Target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	100%	112,74%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagaimana berikut:

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	112,74%

5. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	112,74%	110,87%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu mencapai 112.74%, melampaui target dengan surplus sebesar 12,74%, sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai 110,87%, melampaui target dengan surplus sebesar 10,87%. KPP Pratama Bandar Lampung Satu menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, dengan surplus realisasi sebesar 1,87% lebih besar.

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Edukasi dan penyuluhan baik daring maupun luring
- b. Pemasangan media informasi edukasi dan penyuluhan luar ruang
- c. Pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan edukasi dan penyuluhan
- d. Penyediaan SDM serta sarana dan prasana yang menunjang pemberian pelayanan yang baik dan terstandar sesuai dengan ketentuan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan edukasi dan penyuluhan, menginventarisasi Wajib Pajak yang telah diberikan pelayanan dan penyuluhan, serta melakukan edukasi dan penyuluhan yang baik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif untuk berpartisipasi dalam survei.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan edukasi dan penyuluhan
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja
- c. Optimalisasi media sosial sebagai media edukasi dan penyuluhan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya selama tahun berjalan. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama

Bandar Lampung Satu adalah ukuran tingkat kepuasan pelayanan dan penyuluhan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada *stakeholder* serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP. Namun, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah berupaya melakukan yang terbaik dalam mengedukasi dan menyuluh Wajib Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu bertekad untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Peningkatan edukasi dan penyuluhan yang terarah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, optimalisasi pemanfaatan sarana dan media untuk menyampaikan edukasi dan penyuluhan
- b. Edukasi perpajakan secara berkala dan terencana
- c. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan melalui Pelatihan dan IHT
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

e. **Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase pengawasan pembayaran masa**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	117,90%	117,90%	112,06%	112,06%	116,97%	116,97%
Capaian	133,33%	131,00%	131,00%	124,51%	124,51%	129,97%	129,97%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif, yaitu pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa memiliki definisi, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

• **Formula IKU**

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa} = \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100\%}$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	102,6%	115,68%	116,97%

Sumber: Mandor

Diliat dari historis 4 tahun terakhir, realisasi IKU selalu tercapai dan mengalami kenaikan. Realisasi IKU untuk tahun 2024 sebesar 116,97% sehingga indeks capaian sebesar 129%. Hal ini didorong oleh pelaksanaan pengawasan pembayaran masa yang terdiri dari WP Strategis dan WP Kewilayahan. Pelaksanaan ini berupa penindaklanjutan daftar nominatif STP, melakukan Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan, serta penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa ini merupakan komponen IKU dari Renstra DJP, yaitu Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi dan Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak. Target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	116,97%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagaimana berikut:

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	116,97%

5. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	116,97%	120%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai 116,97%, melampaui target dengan surplus sebesar 16,97%, sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai 120%, melampaui target dengan surplus sebesar 20%. KPP Pratama Bandar Lampung Dua menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan KPP Pratama Bandar Lampung Satu, dengan surplus realisasi 3,03% lebih tinggi.

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Penerbitan STP
- b. Bedah Profil WP untuk penggalan potensi pajak
- c. Pelaksanaan Pengamatan dan KPDL
- d. Menerbitkan Surat Imbauan berdasarkan SE-05

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan pengawasan pembayaran masa yang berupa tindak lanjut daftar nominatif STP, penelitian kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan, serta penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi sesuai target yang ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu melakukan pengawasan pembayaran masa, berupa penerbitan STP, pengawasan dinamisasi angsuran PPh pasal 25 atas WP, melakukan pengawasan tindak lanjut ekstensifikasi Wajib Pajak (DSE).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja ini dapat tercapai dikarenakan adanya mitigasi risiko berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh *Account Representative* setiap bulannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja

- b. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengawasi Wajib Pajak
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah gangguan aplikasi sehingga menghambat proses penerbitan STP, adanya daftar nominatif penerbitan STP yang nominalnya tidak materil, dan Wajib Pajak melakukan kesalahan pembayaran atas masa dan jenis pembayaran yang lain sehingga masuk ke dalam dafnom target STP. Namun, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah berupaya melakukan yang terbaik dalam memenuhi target, yaitu dengan menerbitkan STP, baik sesuai dafnom maupun di luar dafnom.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi Kuantitas (menghasilkan NPWP Baru)
- b. Pengawasan NPWP baru atas WP hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran
- c. Melakukan pengawasan yang optimal terhadap Wajib Pajak Strategis atas angsuran PPh 25.
- d. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), menindaklanjuti data matching, melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, dan menyampaikan imbauan dalam rangka pemenuhan perpajakan.
- e. Melakukan analisis data lebih mendalam untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi keterlambatan dalam pembayaran masa pajak dan mengambil langkah preventif.
- f. Mencari data DSE dengan melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L).
- g. Menerbitkan Surat Teguran dan imbauan atas Wajib Pajak yang belum melakukan penyampaian SPT Masa

f. **Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif**

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	109,50%	109,50%	109,34%	109,34%	120%	120%
Capaian	N/A	109,50%	109,50%	109,34%	109,34%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Pengujian kepatuhan material yang efektif, yaitu Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

- **Formula IKU**

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penyelesaian} \\ \text{permintaan penjelasan} \\ \text{atas data dan/atau} \\ \text{keterangan} \end{array} = \begin{array}{l} (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan} \\ \text{atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) \\ + \\ (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan} \\ \text{atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya} \\ \text{(Berbasis Kewilayahan)}) \end{array}$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	93,62%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Mandor

Menurut data historis 5 tahun terakhir, realisasi IKU tercapai dalam 4 tahun berturut-turut. Realisasi IKU untuk tahun 2024 sebesar 120% sehingga indeks capaian sebesar 120%. Hal ini didorong oleh pelaksanaan P2DK yang efektif seperti penyusunan DPP tiap semester.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini merupakan komponen IKU dari Renstra DJP, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak. Target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagaimana berikut:

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

5. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	120%	120%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai 120%, melampaui target dengan surplus sebesar 20%, sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua juga mencapai 120%, melampaui target dengan surplus yang sama sebesar 20%. Kinerja Kedua KPP menunjukkan capaian yang melampaui target yaitu sebesar 120%, dengan surplus yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya berhasil mencapai target lebih dari yang ditargetkan

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak
- b. Membuat LHP2DK atas respon SP2DK oleh WP
- c. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding

- d. Melakukan visit ke lokasi usaha Wajib Pajak
- e. Meneliti Data Pemicu sebagai acuan penerbitan SP2DK
- f. Membuat Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu profiling/penelitian kegiatan usaha Wajib Pajak, pemanfaatan data baik data approweb, apportal, maupun data Kanwil, serta menindaklanjuti SP2DK dan LHP2DK dengan memperhatikan bobot kualitas dan kuantitas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu mengoptimalkan tindaklanjut penerbitan SP2DK dengan melakukan kunjungan Wajib Pajak dalam penggalan potensi, membuat usul pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diusulkan pemeriksaan, membuat perencanaan Wajib Pajak yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan, dan melakukan komunikasi dan pendekatan secara intensif terkait tindak lanjut SP2DK kepada Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja ini didukung oleh rencana aksi/mitigasi risiko berupa kegiatan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi pajak
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berupa aplikasi dalam mengawasi Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah kuantitas dan kualitas SP2DK yang diterbitkan belum optimal serta DPP mandatori yang diturunkan KPDJP tidak menghasilkan pembayaran pajak. Sehingga atas kendala tersebut penerbitan SP2DK dengan memperhatikan bobot.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- Membuat Surat Permintaan data dan keterangan yang bukan melalui approweb
- IHT dan Bimtek Tematik
- Visit WP potensial
- Bedah Profil secara periodic
- Pembuatan dan update mapping yang lebih baik
- Optimalisasi pemanfaatan data approweb dan apportal

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	102,93%	113,65%	113,65%	116,65%	116,65%	120,00%	120,00%
Capaian	102,93%	113,65%	113,65%	116,65%	116,65%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Pengujian kepatuhan material yang efektif, yaitu Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah IKU yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

IKU ini termasuk indikator dalam PK Kepala Kantor sejak 2023. Realisasi IKU untuk 2 tahun terakhir sebesar 120% sehingga indeks capaian sebesar 120%. Capaian tahun 2024 per triwulannya mengalami kenaikan didukung oleh aktivitas yang dilakukan oleh AR dengan cara menerbitkan STP atas data selain tahun berjalan dan menganalisis data pemicu selain tahun berjalan dan mengimbau WP untuk melakukan pembetulan/penyetoran atas pajak terutang berdasarkan data sesuai dafnom.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	120%	119.64%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai 120%, melampaui target dengan surplus sebesar 20% sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai 119,64%, melampaui target dengan surplus sebesar 19,64%. KPP Pratama Bandar Lampung Satu menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua dengan surplus realisasi 0,36% lebih tinggi.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- Melakukan melakukan penelitian ulang atas data selain tahun berjalan untuk penerbitan SP2DK
- Menerbitkan STP atas data selain tahun berjalan
- Menerbitkan imbauan untuk WP yang kurang setor dan terlambat/tidak lapor
- Menganalisis data pemicu selain tahun berjalan dan mengimbau WP untuk melakukan pembetulan/penyetoran atas pajak terutang berdasarkan data sesuai dafnom

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Seksi kepada setiap *Account Representative* terkait tindak lanjut pemanfaatan data selain tahun berjalan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu periode 1 tahun yaitu dengan melakukan kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah dengan pemanfaatan teknologi berupa aplikasi yang sudah tersedia dari KPDJP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah masih terdapat data dan potensi perpajakan tahun selain tahun berjalan yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh AR. Sehingga atas kendala tersebut dilakukan pemanfaatan data.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- a. Melakukan kegiatan bimbingan *coaching* dan mentoring terhadap AR yang belum melakukan tindak lanjut data selain tahun berjalan yang belum optimal
- b. Melakukan himbauan kepada WP untuk menindaklanjuti data perpajakan selain tahun berjalan

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	114,00%	114,00%	82,43%	82,43%	111,98%	111,98%
Capaian	120,00%	114,00%	114,00%	82,43%	82,43%	111,98%	111,98%

Sumber: KPDJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Pengujian kepatuhan material yang efektif, yaitu Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	111,98%

Sumber: KPDJP

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024. Realisasi yang dicapai sebesar 111,98% sehingga indeks capaiannya sebesar 111,98%. Realisasi IKU yang terdiri dari 3 komponen dengan bobot masing-masing. Komponen pertama dengan capaian 120%, Komponen kedua dengan capaian 99,95%, dan komponen ketiga dengan capaian 120%.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	111,98%	110,77%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, dengan surplus realisasi 1,21% lebih tinggi.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

b. Pencapaian nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam meraih realisasi pada tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu dengan berkoordinasi dengan tim Komite Kepatuhan untuk meminta masukan terkait kegiatan yang telah dilakukan dan rencana yang akan dilakukan untuk dimasukkan kedalam laporan Komite Kepatuhan serta melakukan rapat pembinaan dan DKO secara rutin.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu periode 1 tahun yaitu dengan melakukan usulan target pemenuhan bahan baku pemeriksaan dan meningkatkan capaian kinerja PKM pada rapor kinerja Mandor, baik dari fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi penagihan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi dalam pencapaian kinerja tersebut adalah menyelenggarakan *In House Training* bagi AR mengenai pemanfaatan data approweb untuk meningkatkan realisasi komponen 2 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah dengan pemanfaatan teknologi berupa aplikasi pendukung capaian IKU yang sudah tersedia dari KPDJP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah pengusulan bahan baku pemeriksaan yang lebih kecil daripada target dan nilai PKM dari rapor kinerja Mandor dari fungsi pemeriksaan. Hal tersebut diatasi dengan pengusulan nilai potensi DSPP.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi yang berupa:

- Menjaga sinergi dan koordinasi tim komite kepatuhan dalam menetapkan atau mengambil keputusan, seperti penetapan DSP4.
- Memperhatikan komponen-komponen kinerja PKM pada fungsi pengawasan
- Meningkatkan capaian PKM pemeriksaan atas fungsi pemeriksaan

g. Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,36%	120,00%	120,00%	70,80%	70,80%	120,00%	120,00%
Capaian	109,36%	120,00%	120,00%	70,80%	70,80%	120,00%	120,00%

Sumber: Portal P2, Appraisal

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Penegakan hukum yang efektif, yaitu Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\ & + \\ & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)} \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	102,18%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Portal P2 dan Appraisal

Menurut data historis 5 tahun terakhir, realisasi IKU tercapai dalam 5 tahun berturut-turut. Realisasi IKU untuk tahun 2024 sebesar 120% sehingga indeks capaian sebesar 120%.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	120%	120%

Kedua KPP menunjukkan capaian melebihi target, yaitu 120%, dengan surplus realisasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua KPP berhasil melaksanakan pemeriksaan dan penilaian dengan tingkat efektivitas yang sangat baik.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Pembuatan nota dinas pengingat jatuh tempo kepada tim FPP
- b. Pengusulan DSPP secara optimal dengan bahan baku usulan DSPP yang dapat berasal dari kegiatan pengawasan dengan mempertimbangkan daluwarsa penetapan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu memaksimalkan capaian pada beberapa variabel pemeriksaan. Variabel tersebut adalah persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, dan persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu. Selain itu dengan melaksanakan kegiatan penilaian yang memperhatikan variabel penilaian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu menyelesaikan percepatan penyelesaian dan menjalankan prosedur pemeriksaan tepat waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja ini dapat tercapai sejalan dengan adanya rencana aksi/mitigasi risiko berupa penyelenggaraan Rapat Pembuatan Peta Kepatuhan Dan Pembahasan DSP3 untuk ditetapkan menjadi DSPP Dan DPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup serta membuat ND Kepala Kantor yang berisi pengingat 1 bulan sebelum Jatuh Tempo Pemeriksaan yang ditujukan kepada Supervisor.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pemeriksaan pajak
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan, yang kemudian diatasi dengan melakukan komunikasi secara persuasif.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi, yaitu koordinasi dengan penanggung jawab Wajib Pajak atau *Account Representative* supaya Wajib Pajak dapat kooperatif dalam setiap tahap proses kegiatan.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Tingkat efektivitas penagihan**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	38,91%	70,97%	70,97%	107,25%	107,25%	115,60%	115,60%
Capaian	259,40%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Pegasus

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Penegakan hukum yang efektif, yaitu Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

• **Formula IKU**

Formula:	
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	114,78%	116,99%	96,47%	115,6%

Sumber: Portal P2 dan Appraisal

Menurut data historis 4 tahun terakhir, realisasi IKU selalu tercapai. Realisasi IKU untuk tahun 2024 sebesar 115,6% dan target 75% sehingga indeks capaian sebesar 120%. Hal ini didorong oleh capaian 3 variabel IKU yang sudah maksimal. Variabel tersebut adalah capaian tindakan penagihan sebesar 120%, capaian atas variabel pencairan DSPC sebesar 147%, dan tindak lanjut DSPC sebesar 96%.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	75%	75%
2	Realisasi	115,60%	96%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu berhasil mencapai 115,60%, melampaui target dengan surplus sebesar 40,60%, sedangkan KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencapai 96%, melampaui target dengan surplus sebesar 21%. KPP Pratama Bandar Lampung Satu memperoleh capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, dengan surplus realisasi 19,60% lebih tinggi.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Pelaksanaan tindakan penagihan berupa pengiriman Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan (SPMP) untuk hampir seluruh Wajib Pajak yang memiliki tunggakan sehingga memperbesar peluang cair atas tunggakan, Pemblokiran yang dilakukan secara *tebar jaring* sehingga peluang untuk rekening penanggung pajak terjaring lebih besar, Penjualan Barang Sitaan dan tindakan Pencegahan yang dilakukan dengan hati – hati, sekuensial dan sesuai prosedur.
- b. Melakukan tindakan penagihan sesuai dengan alur kegiatan penagihan dengan memperhatikan aturan dan batas waktu penagihan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan kinerja diantaranya Pelaksanaan tindakan penagihan berupa pengiriman Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan (SPMP) untuk hampir seluruh Wajib Pajak yang memiliki tunggakan sehingga memperbesar peluang cair atas tunggakan, Pemblokiran yang dilakukan secara *tebar jaring* sehingga peluang untuk rekening penanggung pajak terjaring lebih besar, Penjualan

Barang Sitaan dan tindakan Pencegahan yang dilakukan dengan hati – hati, sekuensial dan sesuai prosedur serta tindak lanjut DSPC dan Pencairan DSPC yang diusahakan dengan maksimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU didasarkan dari keberhasilan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu baik persuasif maupun represif. Sebelum Melaksanakan Tindakan Penagihan, KPP Bandar Lampung Satu terlebih dahulu melakukan analisa dasar terhadap Penanggung Pajak dalam hal ini Bedah WP guna mendapatkan informasi Wajib Pajak diantaranya profil Perusahaan, pengurus, penyebab terbitnya tunggakan. Dalam upaya Persuasif diantaranya KPP Bandar Lampung Satu mengimbau Penanggung Pajak baik melalui korespondensi, telepon dan Penelitian Lapangan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi atas kinerja ini dapat tercapai sejalan dengan adanya rencana aksi/mitigasi risiko berupa pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah, *follow up* utang pajak kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran melalui saluran elektronik (Whatsapp/Telepon/Email), pembuatan media publikasi terkait konsekuensi wajib pajak yang menolak membayar nilai ketetapan yang telah ditetapkan, kegiatan asset tracing sebelum dilakukannya sita, Koordinasi dengan Pemeriksa Pajak dan/atau AR terkait aset wajib pajak yang telah diperiksa/dilakukan pengawasan, dan permintaan bantuan kepada Bidang P2IP untuk pengumpulan bahan pembuatan profiling dan aset tracing.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai hal penagihan pajak dengan mengikutsertakan Juru Sita Pajak dan Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dalam Pelatihan yang beraitan dengan Tugas dan Fungsi di Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya Wajib Pajak tidak kooperatif, *ability to pay* wajib pajak yang rendah dan Wajib Pajak yang tidak lagi menjalankan usaha serta pengurus yang telah dilakukan penelitian lapangan namun tidak dapat ditemukan keberadaannya.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan melakukan rencana aksi, yaitu:

- Pelaksanaan Tindakan Penagihan yang sudah dimulai awal tahun dengan realisasi 120% IKU pada akhir Semester I tahun 2025
- Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah setempat terkait terkait Aset Penanggung Pajak yang telah dilakukan penyitaan agar dapat segera dilakukan penjualan barang sitaan
- Kegiatan Penagihan *soft collection* berupa pengiriman Imbauan Penyelesaian Tunggalan Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- Memastikan dan melaksanakan tindakan penagihan secara optimal atas Wajib Pajak yang memiliki Tunggalan yang telah dan/atau akan daluwarsa dan Wajib Pajak yang tidak ditemukan maupun tidak memiliki kemampuan bayar, dibuktikan dengan tidak adanya aset yang bisa dilakukan sita. Tindaklanjut atas kegiatan tersebut yaitu penerbitan PPSTO (Proses Penagihan Sementara Telah Optimal)
- Melakukan penelitian tindak lanjut atas Piutang Pajak yang akan daluwarsa

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
Capaian	N/A	N/A	N/A	133,33%	133,33%	200,00%	200,00%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Penegakan hukum yang efektif, yaitu Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100 %
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200%

Sumber: Portal P2 dan Appraisal

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU baru dalam PK Kepala Kantor di tahun 2024. Target IKU ini adalah 100% dan realisasi IKU sebesar 200% atau sebanyak 2 Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	200%	300%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. pembahasan terhadap WP yang akan dilakukan pemeriksaan IDLP.
- b. pengusulan daftar WP yang akan dilakukan pemeriksaan IDLP

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu analisis yang baik terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh WP.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu menganalisis Wajib Pajak dan membuat LHA atas tindak pidana perpajakan serta koordinasi dengan Kanwil.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam analisis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh WP
- b. Melakukan optimalisasi anggaran untuk pencapaian kinerja

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi adalah proses pembuatan kertas kerja usul bukti permulaan memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan dokumen yang relevan, yang diatasi dengan penyelesaian kertas kerja usul bukti permulaan.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan melakukan rencana aksi, yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh WP
- b. IHT dan Bimtek Tematik pembuatan LHA IDLP

- c. Mengirimkan usulan WP untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
- d. Mengelola waktu yang optimal untuk memastikan bahwa penyampaian bukti permulaan dilakukan secara tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil

h. Sasaran Strategis 8: Data dan informasi yang berkualitas

• Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	89,34%	112,61%	112,61%	126,37%	126,37%	120%	120%
Capaian	446,70%	225,22%	225,22%	157,96%	157,96%	120,00%	120,00%

Sumber: Mandor, Laporan Kanwil

• Deskripsi Sasaran Strategis

IKU ini merupakan bagian dari SS Data dan informasi yang berkualitas, yaitu Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	106,2%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Mandor dan Laporan Kanwil

Menurut data historis 5 tahun terakhir, realisasi IKU tercapai dalam 5 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 s.d. 2022, nama IKU adalah Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Lalu tahun 2023 dan 2024 nama IKU menjadi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hanya terdapat penambahan komponen pada IKU, seperti laporan pengamatan, dimana 2020 s.d. 2022 hanya komponen KPDL saja.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	120%	120%

Kedua KPP menunjukkan capaian melebihi target, yaitu 120%. Ini menunjukkan bahwa kedua KPP berhasil melaksanakan penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan sangat baik.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Kegiatan pengamatan oleh masing-masing AR
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya pemerintah setempat (Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW) dalam rangka pengumpulan data Wajib Pajak
- c. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal (contoh : Pusat perbelanjaan dan swalayan) dalam memperoleh data tenant sebagai bahan kegiatan pengumpulan data lapangan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu penyelesaian laporan pengamatan kurang dari 3 bulan agar mendapat nilai maksimal dan pelaksanaan validasi material dan formal atas data potensi perpajakan yang tepat waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu dengan melakukan kegiatan penyisiran lapangan di wilayah kerja KPP dan pemanfaatan sistem informasi yang baik dapat mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data potensi perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah dengan efisiensi atas pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah penyediaan data potensi perpajakan yang diperoleh dari kegiatan produksi data belum maksimal, yang diatasi dengan memperbanyak kegiatan produksi data.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi, yaitu :

- a. Pemanfaatan data Wajib Pajak pada saat dilakukan visit ke lokasi usaha Wajib Pajak
- b. Melakukan penelitian data Wajib Pajak
- c. Melakukan kegiatan pengamatan dan KPDL yang terencana dan terjadwal
- d. Melakukan perekaman atas data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	84,67%	84,67%	84,67%	87,67%	87,67%	92,33%	92,33%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Kanwil

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

IKU ini merupakan bagian dari SS Data dan informasi yang berkualitas, yaitu Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	86,67%	92,33%

Sumber: Mandor dan Laporan Kanwil

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU baru dalam PK Kepala Kantor dalam 2 tahun terakhir. Realisasi IKU pada 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	55%	55%
2	Realisasi	92,33%	92,33%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat surat konfirmasi ketersediaan data agar KPP dapat melakukan perubahan atas penetapan jenis data yang harus dihimpun dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah
- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat surat jawaban resmi dalam hal elemen data yang sudah ditetapkan menjadi kolom *mandatory* (subjek, objek dan nilai) tidak tersedia dari Pemerintah Daerah, agar dapat dilengkapi dengan menyertakan surat pernyataan tidak tersedianya data tersebut

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu dengan mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penghimpunan data ILAP yang lebih lengkap.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu sinergi dengan instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lain dalam meningkatkan basis data perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bandar

Lampung Satu dengan optimalisasi pengelolaan anggaran dalam penyampaian surat permintaan data.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja IKU ini tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah perbedaan struktur data yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan kebutuhan yang diatur dalam PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan Perjanjian kerja sama nomor KEP-90/PJ.08/2021, KEP-75/PK.04/2021, 41/PK/HK/2021 tentang optimalisasi pemenuhan pajak pusat dan pajak daerah di kota Bandar Lampung, yang diatasi dengan dilakukannya konfirmasi dan pengolahan data.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi, yaitu :

- Berkoordinasi dengan pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menindaklanjuti permintaan data sesuai dengan PMK-228 Tahun 2027 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- Berkoordinasi dengan KPP Pratama Bandar Lampung Dua untuk melakukan validasi data yang akan disampaikan ke Kanwil.

i. **Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,48
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,48%

Sumber: SIKKA, Laporan Kanwil, Laporan KPDJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif adalah upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal

dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

- **Definisi IKU**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah IKU yang terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama adalah tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai

Komponen kedua adalah Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, dimana bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

$$(Capaian\ Komponen\ 1\ x\ 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2\ x\ 50\%)$$

ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	88,64%	100%	100%	117,48

Sumber: Mandor dan Laporan Kanwil

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan pembaruan IKU dari Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi pada tahun 2021 s.d. 2023 dan IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan pada tahun 2020. Target IKU pada tahun 2024 adalah 100 dan realisasinya 117,48.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	117,48%	117,49%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Kegiatan Kebintalan melebihi target.
- b. Pelaporan Kebintalan sebelum batas waktu
- c. Monitoring Pengisian Survey Kebintalan
- d. Melakukan reminder untuk mengerjakan *e-learning* pemenuhan jam pelatihan di Triwulan I agar mendapat poin maksimal
- e. Monitoring pengerjaan *e-learning* sebelum Triwulan I berakhir
- f. Pengiriman materi dan informasi pelaksanaan Ujian Kompetensi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu pelaksanaan kegiatan komponen IKU dan aspek yang memperhatikan *timeline* sehingga mendapatkan nilai maksimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu dengan melaksanakan IHT untuk pemenuhan jam pelatihan pegawai dan mengintegrasikan kegiatan kebintalan dengan kegiatan IHT.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. KPP Pratama Bandar Lampung Satu mengintegrasikan kegiatan dengan kegiatan IHT sehingga efisiensi atas anggaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah pegawai tidak mengerjakan modul e-learning tepat waktu karena banyaknya pekerjaan. Hal ini diatasi dengan pembuatan *reminder* oleh SUKI.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi, yaitu :

- a. Mensinergikan kegiatan Bintal dengan kegiatan ICV
- b. Melakukan reminder untuk mengerjakan e-learning pemenuhan jam pelatihan
- c. Melakukan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi kepada seluruh pegawai dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi (IHT, OJT, Bimtek, Sosialisasi, LDP) yang telah direncanakan

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks Penilaian Integritas Unit**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96,27	96,27
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	113,26%	113,26%

Sumber: Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif adalah upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan..

- **Definisi IKU**

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,5	94,33	89,61	96,27

Sumber: Mandor dan Laporan Kanwil

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023, tetapi mengalami kenaikan di 2024. Target IKU pada tahun 2021 sebesar 80 dan target IKU tahun 2022 s.d. 2024 relatif sama yaitu 85. Di tahun 2024 ini realisasi mencapai 96,27, hal ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh pemilik proses bisnis dari Pelayanan, Pemeriksaan, Penagihan, dan Pengawasan. Pemilik proses bisnis melakukan identifikasi Wajib Pajak penerima layanan untuk dipilih sebagai

responden dan melakukan komunikasi dan konfirmasi ke Wajib Pajak agar tidak lupa mengisi survei.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	85%	85%
2	Realisasi	96,27%	94%

KPP Pratama Bandar Lampung Satu memperoleh capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Bandar Lampung Dua, dengan surplus realisasi 2,27% lebih tinggi.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Melakukan identifikasi wajib pajak penerima layanan untuk dipilih sebagai responden
- b. Melakukan verifikasi nomor telepon dan alamat email responden sebelum longlist responden dikirim ke KITSDA
- c. Menjalani komunikasi yang baik dan koordinasi yang efektif kepada Wajib Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu pelaksanaan identifikasi Wajib Pajak yang baik sehingga semua Wajib Pajak mengisi survei.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu dengan berkoordinasi dengan seksi-seksi pemberi layanan untuk memberikan nama responden, mengirimkan daftar responden tepat waktu, dan monitoring saat pelaksanaan survei sudah dibuka.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi yaitu atas pemanfaatan teknologi yang membentuk basis data pengisian survei yang digunakan sebagai bahan monitoring.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah pemilihan responden yang terburu-buru dan responden yang belum mengetahui secara detail terkait IPIU. Atas hal tersebut, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah telah menginformasikan terkait IPIU ke responden Wajib Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi, yaitu :

- Mensinergikan dengan Tim ZIWBK
- Membuat ND ditujukan ke Pemilik Proses Bisnis agar mengingatkan WP (responden yang dipilih) untuk mengisi survei
- Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan untuk mengirim *reminder* ke responden melalui *WhatsApp Blast*

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	53,14	58,35	58,35	88,63	88,63	100	100
Capaian	231,04%	124,15%	124,15%	126,61%	126,61%	111,11%	111,11%

Sumber: Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif adalah upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah administrasi dan pelaporan serta realisasi Rencana Mitigasi Risiko.

- **Formula IKU**

$$\begin{array}{c} \text{Indeks Efektivitas} \\ \text{Implementasi} \\ \text{Manajemen Kinerja} \\ \text{dan Manajemen} \\ \text{Risiko} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Indeks} \\ \text{Implementasi} \\ \text{Manajemen} \\ \text{Kinerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Indeks} \\ \text{Implementasi} \\ \text{Manajemen} \\ \text{Risiko} \end{array}$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100%	100%	99,5%	100%	100

Sumber: Mandor dan Laporan Kanwil

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan pembaruan dari IKU tahun sebelumnya. Dari tahun 2020-2023, IKU ini hanya mengukur realisasi dari pelaksanaan DKO dan penerapan manajemen risiko. Namun, saat 2024, IKU ini mengalami perubahan komponen. Perubahan komponen yang dimaksud adalah dengan adanya pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja. Target IKU ini pada 2024 adalah 90 dan realisasi sebesar 100 sehingga indeks capaiannya 111,11%.

3. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	90%	90%
2	Realisasi	100%	99,66%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Imbauan manajemen kinerja yang berupa Budaya Kinerja baik melalui sosialisasi tatap muka maupun dalam bentuk Nota Dinas
- b. Pembuatan pengingat untuk melaksanakan rencana aksi Manajemen Risiko.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu pelaksanaan yang tepat waktu dan maksimal dari setiap komponen IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU berasal dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu seperti pelaksanaan DKO tepat waktu, pengadministrasian yang lengkap, dan penyelesaian rencana aksi yang sesuai *timeline*.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi yaitu memanfaatkan aplikasi pendukung untuk memonitoring capaian IKU serta menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah manual IKU yang baru sehingga perlu penyesuaian untuk melaksanakan kegiatannya dan data realisasi yang disajikan saat DKO belum turun dari KPDJP. Hal tersebut mampu diatasi dengan melakukan pemahaman yang mendalam atas manual IKU dan penghitungan manual data realisasi.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi, yaitu :

- a. Penyampaian imbauan manajemen kinerja tepat waktu
- b. Pelaksanaan Pra DKRO
- c. Membuat *reminder* pelaksanaan rencana aksi MR
- d. Permintaan realisasi rencana aksi MR

j. **Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

1. **Target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	104,87	104,87	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	100,00%	104,87%	104,87%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki definisi dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100),

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,9%	97,63%	92,25%	97,2	120

Sumber: Mandor

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah lanjutan dari IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 s.d. 2022. Pada tahun 2023 IKU tersebut berubah nomenklatur. Target IKU tahun 2024 adalah 100 dan realisasi berada di angka 120.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU ini merupakan komponen IKU dari Renstra DJP, yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagaimana berikut:

Nama IKU	Target tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120%	95,5	120%

5. Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan unit selevel

No	Unit	KPP Pratama Bandar Lampung Satu	KPP Pratama Bandar Lampung Dua
1	Target	100%	100%
2	Realisasi	120%	120%

Kedua KPP menunjukkan capaian melebihi target, yaitu 120%. Ini menunjukkan bahwa kedua KPP berhasil mendapatkan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan sangat baik.

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh seluruh pemilik proses bisnis, di antaranya dengan melakukan:

- a. Pembuatan daftar rencana pelaksanaan penggantian uang persediaan (GUP) setiap bulan
- b. Berkoordinasi dengan KPPN terkait dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan penyampaian SPM
- c. Monitoring dan evaluasi atas anggaran secara bulanan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pencapaian realisasi tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja, yaitu dengan melakukan pengetatan pengelolaan keuangan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU pastinya berasal dari keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu yaitu pembuatan prognosa Capaian Kinerja Anggaran pada setiap awal bulan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. KPP Pratama Bandar Lampung Satu melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu adalah adanya program kerja mandatori yang belum direncanakan pada RKAKL. Hal tersebut diatasi melalui revisi anggaran.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Di tahun 2025, KPP Pratama Bandar Lampung Satu berkomitmen untuk mencapai capaian yang lebih baik dengan rencana aksi, yaitu :

- a. Membuat prognosa Capaian Kinerja Anggaran pada setiap awal bulan.

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan terkait capaian kinerja anggaran

B. Realisasi Anggaran

Pada awalnya, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah menetapkan anggaran sebesar Rp 5,3 Milyar untuk kegiatan di Tahun 2024. Namun, setelah melakukan evaluasi dan analisis lebih lanjut, KPP Pratama Bandar Lampung Satu menyadari bahwa ada beberapa komponen yang memerlukan penyesuaian anggaran. Berikut disampaikan seperti pada tabel di bawah ini.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	994.949.000	977.588.000	98,26%
2	Belanja Barang	4.699.063.000	4.528.234.909	96,36%
3	Belanja Modal	117.711.000	117.711.000	100,00%

Setelah melakukan evaluasi dan perhitungan ulang, diputuskan untuk mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp 5,8 M. Penambahan ini digunakan untuk meningkatkan kualitas material, memperluas jangkauan kegiatan, dan memenuhi kebutuhan lainnya yang tidak terduga sebelumnya.

Dengan demikian, total anggaran DIPA Akhir KPP Pratama Bandar Lampung Satu sekarang menjadi Rp 5,8 M. KPP Pratama Bandar Lampung Satu yakin penambahan anggaran ini berdampak pada pencapaian tujuan Kegiatan dengan lebih baik dan memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah melakukan efisiensi atas:

- a. Anggaran, yaitu dengan melakukan pengetatan pengeluaran, salah satunya melalui pengelolaan SPD.
- b. Sumber daya manusia, yaitu penempatan pegawai di seksi dengan mempertimbangkan beban kerja yang ada
- c. Teknologi informasi, yaitu adanya inovasi terhadap layanan kepada WP, antara lain KILUAN dan MAKKO TANDING yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan transparansi layanan.

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, pada tahun 2024 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Hal yang dimonitoring dan dievaluasi adalah terkait manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai. Atas hasil dari monev tersebut, KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah melakukan tindak lanjut sebagai penerapan prinsip *Continuous Improvement*.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah :

1. Melakukan pembahasan melalui DKO maupun rapat internal sebagai langkah-langkah mitigasi risiko di tahun 2024 atas IKU yang belum tercapai di tahun sebelumnya
2. Menyampaikan ke pemilik proses bisnis untuk memperbarui Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulanan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
3. Mempublikasi LAKIN melalui media sosial (Instagram KPP) pada tanggal 31 Desember 2024
4. Melakukan perbaikan sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 tahun 2014 untuk penyusunan LAKIN tahun 2024

BAB IV

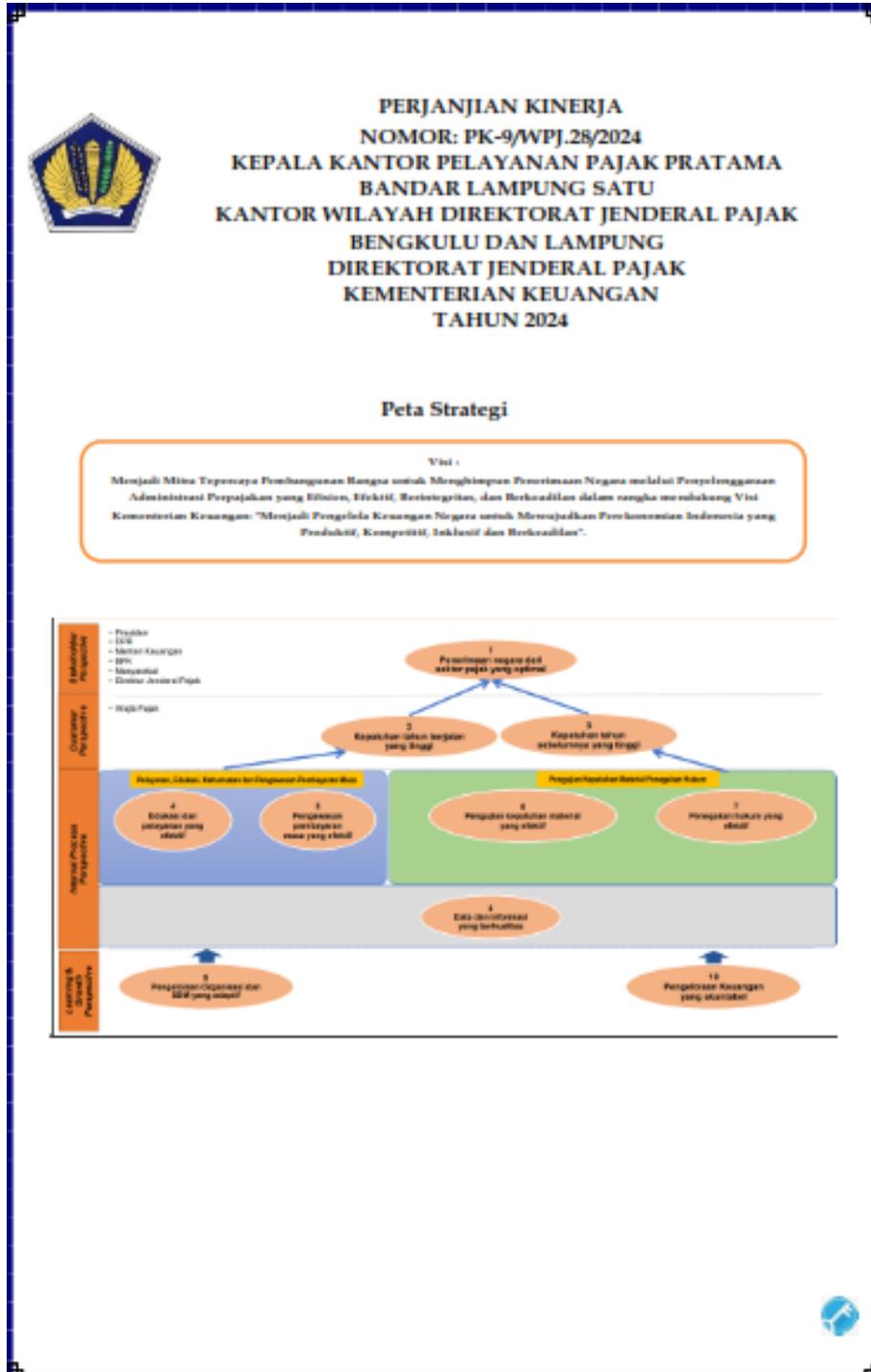
PENUTUP

Penyusunan LAKIN bertujuan untuk memberikan informasi atas capaian yang diraih oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu. Selain itu, LAKIN sebagai alat evaluasi kinerja kantor selama satu tahun dalam pencapaian sasaran. Dari 20 IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, 19 IKU telah mencapai target dan terdapat 1 IKU yang capaiannya di bawah target yang ditentukan. Atas 1 IKU tersebut, KPP Pratama Bandar Lampung Satu akan melakukan pengawasan pembayaran masa khususnya WP penentu penerimaan, baik WP Strategis maupun Kewilayahan. Tentu saja ini menjadi pemacu pegawai KPP Pratama Bandar Lampung Satu untuk bekerja keras dan bahu membahu mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja di tahun 2024 tentu saja memiliki kendala, baik dari eksternal maupun internal. Namun dengan kondisi seperti itu tidak menurunkan semangat pegawai untuk menghimpun penerimaan dengan penggalian potensi pembayaran pajak dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak di tahun-tahun mendatang. Kemudian, diharapkan kendala/hambatan untuk tahun mendatang dapat berkurang dan dapat diatasi dengan lebih baik lagi dengan adanya langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan yaitu dengan penyusunan rencana kinerja tahun berikutnya. Selanjutnya, dengan tersusunnya LAKIN Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengambilan kebijakan bagi pemilik proses bisnis dalam meningkatkan kinerja KPP Pratama Bandar Lampung Satu di tahun mendatang serta diharapkan menjadi informasi dan masukan kepada pihak-pihak terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDAR LAMPUNG SATU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

	Rp	1.014.518.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	410.035.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	306.338.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	R	298.145.000

B. Program Dukungan Manajemen

	Rp	
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.525.165.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	994.949.000

Total **Rp 5.534.632.000**

Bandar Lampung, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandar Lampung Satu,

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak
Bengkulu dan Lampung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Bowo



Ditandatangani Secara Elektronik
Imam Nashirudin

- Kegiatan KPP Pratama Bandar Lampung Satu di Tahun 2024

Kelas Edukasi Coretax

Pajak Bertutur 2024



KAMIS, 19 DESEMBER 2024



KAMIS, 19 DESEMBER 2024



Kunjungan dan Audiensi BSI Lampung



Penyitaan Serentak Aset Penunggak Pajak



Edukasi Perpajakan Finalis Muli Mekhanai



Pojok Pajak

